



**KEPALA DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA SOJOMERTO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Ditetapkan :
HARI KAMIS , 12 JANUARI 2023**

**DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Napak Tilas KM 7 Desa Sojomerto
Email : pmdessojomerto2013@gmail.com Kode Pos 51356



KEPALA DESA SOJOMERTO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA SOJOMERTO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOJOMERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 32 ayat (1a) tentang Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk Program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 35 huruf a tentang program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
33. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 152);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E Nomor 3);

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);

53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);

60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Barbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 16);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);
64. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sojomerto Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2017 Nomor 5);
65. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sojomerto (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2018 Nomor 05);

66. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2019 Nomor 02);
67. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sojomerto Tahun 2023 (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2022 Nomor 1);
68. Peraturan Desa Sojomerto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sojomerto Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sojomerto Tahun 2022 Nomor 4);
69. Peraturan Kepala Desa Sojomerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sojomerto Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sojomerto Nomor 6 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) berdasarkan kriteria ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 pasal 36, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili didesa bersangkutan dan diprioritaskan untuk Keluarga yang termasuk dalam kategori Kemiskinan Ekstrem;
2. Keluarga Miskin yang kehilangan Mata Pencaharian;
3. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
4. Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN;
5. Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan
6. Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut:

- a. Besaran BLT-DD setiap bulan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga; dan
- b. Masa penyaluran BLT-DD diberikan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023.

KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan kepala Desa ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

KEENAM

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sojomerto.

Ditetapkan di : Desa Sojomerto

Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DESA SOJOMERTO

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Sojomerto. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BENDAL" at the top, "KECAMATAN GEMUH" at the bottom, and "KEPALA DESA SOJOMERTO" in the center. A signature is written over the stamp, and the name "RIDU RIMBAWANTO" is printed below it.

RIDU RIMBAWANTO

BERITA DESA SOJOMERTO TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN : Peraturan Kepala Desa Sojomerto

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 12 Januari 2023

Tentang: Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT

DD) Tahun Anggaran 2023

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

No	Kecamatan	Desa	Nama	JK	Alamat	NIK	No. KK	Usaha/Pekerjaan	Jumlah Keluarga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	GEMUH	SOJOMERTO	UMAR	L		332 001	3324 001	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
2	GEMUH	SOJOMERTO	PUJIAH	P		332 002	3324 914	MENGURUS RUMAH TANGGA	5
3	GEMUH	SOJOMERTO	UMI	P		332 003	3324 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
4	GEMUH	SOJOMERTO	SAYUDI	L		332 001	3324 155	BURUH HARIAN LEPAS	2
5	GEMUH	SOJOMERTO	ABDUL MASRUR	L		332 001	3324 838	BURUH HARIAN LEPAS	2
6	GEMUH	SOJOMERTO	NUR LATIFAH	P		332 002	3324 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
7	GEMUH	SOJOMERTO	JUMIATI	P		332 001	3324 145	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
8	GEMUH	SOJOMERTO	SUMIAH	P		332 001	3324 991	PETANI/PEKEBUN	2
9	GEMUH	SOJOMERTO	JURYATI	P		332 001	3324 148	TIDAK BEKERJA	6
10	GEMUH	SOJOMERTO	RUKANAH	P		332 004	3324 215	PETANI/PEKEBUN	3

11	GEMUH	SOJOMERTO	KASMINAH	P		3324		01	3324		01	TIDAK BEKERJA	1
12	GEMUH	SOJOMERTO	SITI MAEMONAH	P		3324		01	3324		07	TIDAK BEKERJA	3
13	GEMUH	SOJOMERTO	KASTIK	P		3324		01	3324		38	PETANI/PEKEBUN	3
14	GEMUH	SOJOMERTO	SITI RUMSIH	P		3324		01	3324		41	RUMAH TANGGA	2
15	GEMUH	SOJOMERTO	SUPADI	L		3324		01	3324		24	TIDAK BEKERJA	4
16	GEMUH	SOJOMERTO	SITI KHAMIDAH	P		3324		02	3324		56	TIDAK BEKERJA	1
17	GEMUH	SOJOMERTO	TUHARSIH	P		3324		06	3324		03	RUMAH TANGGA	3
18	GEMUH	SOJOMERTO	SUTARI	L		3324		01	3324		32	TIDAK BEKERJA	2
19	GEMUH	SOJOMERTO	WAHYUNI	P		3324		02	3324		03	TIDAK BEKERJA	1
20	GEMUH	SOJOMERTO	SUKARTI	P		3324		01	3324		15	TIDAK BEKERJA	1
21	GEMUH	SOJOMERTO	PURWANTO	L		3324		02	3324		04	WIRASWASTA	5
22	GEMUH	SOJOMERTO	ROCHADI	L		3324		02	3324		88	PETANI/PEKEBUN	4
23	GEMUH	SOJOMERTO	BAROZA	L		3324		01	3324		04	BURUH HARIAN LEPAS	4
24	GEMUH	SOJOMERTO	SITI JUMIATUN	P		3324		01	3324		20	PETANI/PEKEBUN	3
25	GEMUH	SOJOMERTO	MUSLIKIN	L		3324		01	3324		22	WIRASWASTA	4
26	GEMUH	SOJOMERTO	SUYITNO	L		3324		01	3324		34	KARYAWAN SWASTA	5
27	GEMUH	SOJOMERTO	ATUN	P		3324		01	3324		02	PETANI/PEKEBUN	4
28	GEMUH	SOJOMERTO	SUYATIN	L		3324		01	3324		64	PETANI/PEKEBUN	2
29	GEMUH	SOJOMERTO	NATALIA WS	P		2171		15	3324		05	WIRASWASTA	5
30	GEMUH	SOJOMERTO	KASDI	L		3324		02	3324		38	PETANI/PEKEBUN	2

31	GEMUH	SOJOMERTO	SUNITI	P		3324		01	3324		533	PETANI/PEKEBUN	6
32	GEMUH	SOJOMERTO	GANTI	P		3324		02	3324		001	PETANI/PEKEBUN	1
33	GEMUH	SOJOMERTO	ZULIYATI	P		3324		03	3324		002	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
34	GEMUH	SOJOMERTO	SUNASRI	L		3324		02	3324		840	PETANI/PEKEBUN	2
35	GEMUH	SOJOMERTO	RENI	P		3324		01	3324		785	PETANI/PEKEBUN	2
36	GEMUH	SOJOMERTO	SLAMET	L		3324		01	3324		374	PETANI/PEKEBUN	2
37	GEMUH	SOJOMERTO	RESI	P		3324		01	3324		889	PETANI/PEKEBUN	1
38	GEMUH	SOJOMERTO	JUMIAH	P		3324		01				PETANI/PEKEBUN	1
39	GEMUH	SOJOMERTO	AINUL YAQIN	L		3324		01	332		30	TIDAK BERKERJA	4
40	GEMUH	SOJOMERTO	SUTIAH	P		3324		01	3324		004	PETANI/PEKEBUN	1



 KEPALA DESA SOJOMERTO
 RIDU RIMBAWANTO